

II. STUDI PUSTAKA

A. Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu dasar yang digunakan untuk mengukur tingkat perekonomian suatu wilayah adalah dengan menggunakan besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB disajikan atas dasar harga berlaku (sesuai dengan pasar/transaksi pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga pasar pada tahun tertentu).

Perubahan besaran PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun penghitungan masih memuat akibat terjadinya inflasi/deflasi sehingga tidak memperlihatkan pertumbuhan atau perubahan PDRB secara riil. Sebaliknya, PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga pasar pada tahun tertentu, sehingga perubahan besaran PDRB sudah terlepas dari pengaruh inflasi/deflasi.

Besar kecilnya PDRB yang dapat dihasilkan oleh suatu wilayah/daerah dipengaruhi oleh besarnya sumberdaya alam yang telah dimanfaatkan dan macamnya, jumlah dan mutu sumberdaya manusia, kebijaksanaan pemerintah, letak geografis serta tersedianya sarana dan prasarana. Dalam menghitung pendapatan regional, BPS (1995) memasukkan seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor/lapangan usaha yang melakukan usahanya disuatu wilayah atau daerah, tanpa memperhatikan pemilik atas faktor

produksi. Dengan demikian, PDRB secara keseluruhan menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan/balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut. Penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu:

1. Metode Langsung

Dalam menghitung PDRB dengan metode langsung, penghitungan didasarkan sepenuhnya kepada data daerah yang terpisah dari data nasional, sehingga hasil penghitungannya mencakup seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Dalam metode ini PDRB dapat diukur dengan 3 (tiga) pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan produksi

PDRB merupakan jumlah barang dan jasa terakhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Unit-unit produksi dimaksud secara garis besar dipilah-pilah menjadi 11 (sebelas) sektor, yaitu: (1) pertanian; (2) pertambangan dan galian; (3) industri pengolahan; (4) listrik, gas dan air minum; (5) bangunan; (6) perdagangan; (7) pengangkutan dan komunikasi; (8) bank dan lembaga keuangan lainnya; (9) sewa rumah; (10) pemerintahan; (11) jasa-jasa.

b. Pendekatan pendapatan

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima faktor-faktor produksi yang turut serta dalam proses produksi disuatu wilayah dalam jangka waktu setahun. Balas jasa produksi tersebut meliputi upah dan gaji, sewa tanah,

bunga modal, dan keuntungan. Semuanya dihitung sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam hal ini mencakup juga penyusutan dan pajak-pajak tak langsung neto. Jumlah komponen pendapatan persektor disebut *nilai tambah bruto sektoral*. Oleh sebab itu, PDRB menurut pendekatan pendapatan merupakan penjumlahan dari nilai tambah bruto seluruh sektor atau lapangan usaha.

c. Pendekatan pengeluaran

Menurut pendekatan ini PDRB adalah jumlah seluruh komponen permintaan akhir, meliputi (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan; (2) pembentukan modal tetap domestik bruto dan perubahan stok; (3) pengeluaran konsumsi pemerintah; (4) ekspor neto (yaitu ekspor dikurangi impor), dalam jangka waktu satu tahun.

2. Metode Tidak Langsung/Alokasi

Dalam melakukan perhitungan PDRB melalui metode tidak langsung/alokasi penghitung dilakukan dengan cara menghitung nilai tambah suatu kelompok kegiatan ekonomi dengan mengalokasikan nilai tambah nasional kedalam masing-masing kegiatan ekonomi pada tingkat regional. Sebagai alokator digunakan indikator yang paling besar pengaruhnya atau erat kaitannya dengan produktivitas kegiatan ekonomi tersebut.

Penghitungan PDRB pada suatu wilayah/daerah dengan menggunakan metode langsung atau tidak langsung/alokasi sangat tergantung pada data yang tersedia. Pada dasarnya, pemakaian kedua metode tersebut akan saling menunjang satu sama lain, karena penghitungan dengan metode langsung akan

mendorong peningkatan mutu atau kualitas data daerah, sedangkan penghitungan dengan metode tidak langsung merupakan koreksi dan pembandingan bagi data daerah.

Dilihat dari penjelasan di atas, PDRB dari suatu wilayah lebih menunjukkan pada besaran produksi suatu daerah, bukan pendapatan yang sebenarnya diterima oleh penduduk di daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian, PDRB merupakan data yang paling representatif dalam menunjukkan pendapatan dibandingkan dengan data-data lainnya.

B. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Dalam dunia nyata, amat sulit untuk mencatat jumlah unit barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu. Kesulitan ini muncul bukan saja karena jenis barang dan jasa yang dihasilkan sangat beragam, tetapi satuan ukurannya pun berbeda. Karena itu angka yang digunakan untuk menaksir perubahan output adalah nilai moneterinya (uang) yang tercermin dalam nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai PDB yang digunakan adalah PDB berdasarkan harga konstan. Sebab, dengan menggunakan harga konstan, pengaruh perubahan harga telah dihilangkan, sehingga sekalipun angka yang muncul adalah nilai uang dari total output barang dan jasa, perubahan nilai PDB sekaligus menunjukkan perubahan jumlah kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu.

Menurut Michael P Todaro (2004) terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, antara lain :

1. Akomodasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia.
2. Pertumbuhan penduduk yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak akumulasi capital.
3. Kemajuan teknologi.

C. Pengertian dan Konsep Ketimpangan

Ketimpangan merupakan suatu fenomena yang terjadi hampir di lapisan negara di dunia, baik itu negara miskin, negara sedang berkembang, maupun negara maju, hanya yang membedakan dari semuanya itu yaitu besaran tingkat ketimpangan tersebut, karenanya ketimpangan itu tidak mungkin dihilangkan namun hanya dapat ditekan hingga batas yang dapat ditoleransi.

Dalam laporan Pembangunan Dunia tahun 2006, publikasi World Bank, dinyatakan bahwa ketimpangan (baik antar wilayah maupun antar negara) merupakan hal yang penting dalam pembangunan, karena ketimpangan mempengaruhi proses pembangunan jangka panjang. Dua saluran yang digunakan ketimpangan untuk mempengaruhi pembangunan dalam jangka panjang adalah melalui pengaruh- pengaruh kesempatan yang timpang ketika kondisi pasar tidak sempurna dan berbagai kosekuensi ketimpangan untuk

kualitas institusi yang dikembangkan oleh suatu masyarakat. Lebih lanjut, World Bank dalam laporannya tersebut menyatakan bahwa faktor- faktor geografis dan historis yang mendasari ketimpangan antar wilayah sangat kompleks dan tumpang tindih. Kemampuan mengelola sumber daya yang rendah dan jarak dari pasar yang jauh dapat menghambat proses pembangunan di kawasan-kawasan tertinggal. Dalam banyak kasus, perbedaan-perbedaan ekonomi itu disebabkan oleh relasi yang tidak setara dan sudah berlangsung lama, antara kawasan-kawasan yang maju dengan yang tertinggal, serta kelemahan institusional pada waktu sebelumnya.

Myrdal (1957) dalam Jhingan (2004) menerangkan ketimpangan antar daerah dengan membangun teori keterbelakangan dan pembangunan ekonominya disekitar ide ketimpangan regional pada taraf nasional dan internasional. Untuk menjelaskan hal itu, Myrdal menggunakan ide *spread effect* dan *backwash effect* sebagai bentuk pengaruh penjalaran dari pusat pertumbuhan ke daerah sekitar.

Spread effect didefinisikan sebagai suatu pengaruh yang menguntungkan (*favorable effect*), yang mencakup aliran kegiatan-kegiatan investasi dari pusat pertumbuhan ke wilayah sekitar. *Backwash effect* didefinisikan sebagai pengaruh yang merugikan (*infavorable effect*) yang mencakup aliran manusia dari wilayah sekitar termasuk aliran modal ke wilayah inti, sehingga mengakibatkan berkurangnya modal pembangunan bagi wilayah pinggiran yang sebenarnya diperlukan untuk dapat mengimbangi perkembangan wilayah

inti. Lebih lanjut, Myrdal mengemukakan ketimpangan regional terjadi akibat besarnya pengaruh *backwash effect* dibandingkan dengan *spread effect* di negara-negara terbelakang. Perbedaan kemajuan wilayah berarti tidak samanya kemampuan untuk bertumbuh sehingga yang timbul adalah terjadinya ketidakmerataan antar daerah. Sehubungan dengan hal ini, muncul pendapat dan studi-studi empiris yang menempatkan pemerataan dan pertumbuhan pada satu posisi yang dikotonomis.

Kuznets (1957) dalam Tambunan (2003) mengemukakan suatu hipotesis yang terkenal dengan sebutan “Hipotesis U terbalik”. Hipotesis ini dihasilkan melalui suatu kajian empiris terhadap pola pertumbuhan sejumlah negara didunia, pada tahap awal pertumbuhan ekonomi terdapat *trade-off* antara pertumbuhan dan pemerataan. Pola ini disebabkan karena pertumbuhan pada tahap awal pembangunan cenderung dipusatkan pada sektor modern perekonomian yang pada saat itu kecil dalam penyerapan tenaga kerja. Ketimpangan membesar karena kesenjangan antar sektor modern dan tradisional meningkat. Peningkatan tersebut terjadi karena perkembangan disektor modern lebih cepat dibandingkan dengan sektor tradisional. Akan tetapi dalam jangka panjang, pada saat kondisi ekonomi mencapai tingkat kedewasaan (*maturity*) dan dengan asumsi mekanisme pasar bebas serta mobilitas semua faktor-faktor produksi antar negara tanpa sedikitpun rintangan atau distorsi, maka perbedaan dalam laju pertumbuhan *output* antar negara akan cenderung mengecil bersamaan dengan tingkat pendapatan

perkapita dan laju pertumbuhan rata-rata-nya yang semakin tinggi di setiap negara, yang akhirnya menghilangkan kesenjangan.

Salah satu kajian yang menguatkan hipotesis Kuznet tersebut dilakukan oleh Williamson (1965) dalam Tambunan (2003). Williamson untuk pertama kalinya menyelidiki masalah ketimpangan antar daerah dengan membobot perhitungan *coefficient of variation (CV)* dengan jumlah penduduk menurut wilayah. Dalam studinya ia menemukan bahwa dalam tahap awal pembangunan ekonomi disparitas dalam distribusi pendapatan akan membesar dan terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu yang pada awalnya sudah relatif maju, misalnya dalam pembangunan industri, infrastruktur, dan SDM. Kemudian dalam tahap pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, terjadi konvergensi dan ketimpangan dalam distribusi pendapatan akan mengalami penurunan.

D. Pengukuran Ketimpangan

Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara dikalangan penduduknya.

Terdapat berbagai kriteria atau tolok ukur untuk menilai pemerataan distribusi yang dimaksud, diantaranya yaitu:

1. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk secara kumulatif pula. Kurva ini terletak

disebuah bujur sangkar yang disisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi dasarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurvanya sendiri ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang atau tidak merata.

2. Indeks Gini

Gini atau lengkapnya Corrado Gini merumuskan suatu ukuran untuk menghitung tingkat ketimpangan pendapatan personal secara agregatif yang diterima diatas tingkat tertentu. Hasil temuannya sering disebut sebagai *gini coefficient* atau indeks gini.

Koefisien gini adalah suatu koefisien yang berkisar dari angka 0 hingga 1, yang menjelaskan kadar pemerataan pendapatan. Koefisien yang semakin mendekati 0 berarti distribusi pendapatan semakin merata, sebaliknya koefisien yang semakin mendekati 1 berarti distribusi pendapatan semakin timpang. Angka rasio Gini dapat ditaksir secara visual langsung dari kurva Lorenz, yaitu perbandingan luas area yang terletak diantara kurva Lorenz dan diagonal terhadap luas area segitiga OBC. Semakin melengkung kurva Lorenz, akan semakin luas yang dibagi rasio Gini-nya akan semakin besar, menyiratkan distribusi pendapatan yang semakin timpang.

Todaro (1981) memberikan batasan, bahwa negara-negara yang ketimpangannya tinggi, maka koefisien Gini-nya terletak antara 0,5-0,7.

Sedang negara-negara yang ketimpangannya relatif rendah (merata), koefisien Gini-nya terletak antara 0,2-0,35.

3. Kriteria Bank Dunia

Bank Dunia yang bekerjasama dengan *Institute of Development Studies* menentukan kriteria tentang penggolongan distribusi pendapatan, apakah dalam keadaan ketimpangan yang parah, sedang, atau ringan. Kriteria tersebut menunjukkan bahwa:

- a. Jika 40 persen penduduk suatu negara berpendapatan terendah memperoleh sekitar kurang 12 persen jumlah pendapatan negara tersebut maka hal ini termasuk kedalam ketimpangan yang tinggi.
- b. Kelompok kedua adalah 40 persen dari jumlah penduduk yang berpendapatan terendah, tetapi hanya menerima antara 12-17 persen dari seluruh pendapatan negara. Golongan ini masih dapat dikatakan sebagai keadaan dengan ketimpangan yang sedang.
- c. Jika golongan penduduk yang 40 persen tersebut memperoleh lebih dari 17 persen dari total pendapatan negaranya, maka tingkat ketimpangannya termasuk rendah.

4. Indeks Williamson

Indeks Williamson ini diperkenalkan oleh Jeffry G Williamson (1965), penghitungan nilai ini didasarkan pada indeks variasi (CV) dan Williamson memodifikasi perhitungan ini dengan menimbanginya dengan proporsi penduduk wilayah. Berbeda halnya dengan indeks gini yang menghitung nilai distribusi pendapatan seluruh rumah tangga dalam suatu daerah atau negara,

indeks Williamson ini dapat melihat besarnya ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah dalam sebuah wilayah. Semakin besar angka indeks Williamson ini maka semakin besar pula tingkat ketimpangan yang terjadi.

5. Teori Kuznets

Kuznets dalam analisisnya mengenai pola sejarah pertumbuhan negara-negara maju, menyatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, sedangkan pada tahap selanjutnya cenderung membaik.

Argumen tradisional dalam analisisnya mengenai pembangunan ekonomi jarang sekali menyinggung hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan, namun sebagian besar teorinya menyatakan bahwa distribusi pendapatan yang sangat tidak merata diperlukan untuk menggalakkan pertumbuhan yang cepat. Apabila ketidakadilan merupakan sesuatu yang diperlukan dalam proses pertumbuhan maksimal dan apabila pertumbuhan jangka panjang diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk melalui "tetesan" proses persaingan dan sistem ekonomi campuran, maka perhatian langsung mengenai pemberantasan kemiskinan merupakan suatu usaha besar tersendiri. Dasar argumen ekonomi yang mengizinkan ketidakmerataan pendapatan adalah bahwa pendapatan perseorangan dan perusahaan yang tinggi merupakan kondisi yang diperlukan bagi perkembangan. Dalam model Harrod-Domar, yaitu andaikata golongan kaya menabung dan menginvestasikan sebagian keuntungannya, sementara golongan miskin membelanjakan semua pendapatannya berupa barang-narang konsumsi dan laju pertumbuhan GNP langsung berkaitan dengan proporsi

pendapatan nasional yang ditabung, maka perekonomian akan ditandai oleh distribusi pendapatan yang sangat tidak merata.

E. Definisi Ketenagakerjaan

Secara umum tenaga kerja (*manpower*) atau penduduk usia kerja (UK) diartikan sebagai penduduk dalam usia kerja (berusia 15 tahun keatas) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Menurut Dumairy tenaga kerja adalah penduduk yang berumur pada batas usia kerja, dimana batas usia kerja setiap negara berbeda-beda (Dumairy, 1996).

Hal serupa juga dinyatakan Simanjuntak (2001) yang menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan melakukan kegiatan lain seperti bersekolah atau mengurus rumah tangga dengan batasan umur 15 tahun. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Sitanggang dan Nachrowi (2004) yang menyatakan bahwa tenaga kerja adalah sebagian dari keseluruhan penduduk yang secara potensial dapat menghasilkan barang dan jasa.

Hanya sebagian kecil penduduk Indonesia yang memiliki tunjangan di hari tua yaitu pegawai negeri dan sebagian kecil pegawai perusahaan swasta. Untuk golongan inipun, pendapatan yang mereka terima tidak mencukupi kebutuhan

mereka sehari-hari. Oleh sebab itu mereka yang telah mencapai usaha pensiun biasanya tetap masih harus bekerja sehingga mereka tetap digolongkan sebagai tenaga kerja (Payaman Simanjuntak, 2001).

Pada statistik Indonesia sejak tahun 1971 batas usia kerja adalah seseorang yang sudah berumur 10 tahun atau lebih, namun sesuai dengan Konversi ILO (*International Labor Organization*) semenjak dilaksanakan Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) tahun 2001 batas usia kerja yang semula 10 tahun atau lebih dirubah menjadi 15 tahun atau lebih. Konsep tersebut membagi penduduk menjadi dua kelompok yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja.

Angkatan kerja (*labor force*) adalah penduduk yang belum bekerja namun siap untuk berkerja atau sedang mencari pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku (Suparmoko, 2002). Dalam hal ini adalah penduduk yang kegiatan utamanya selama seminggu yang lalu bekerja (K), atau sedang mencari pekerjaan (MP). Untuk kategori bekerja apabila minimum bekerja selama 1 jam selama seminggu yang lalu untuk kegiatan produktif sebelum pencacahan dilakukan. Sedangkan mencari pekerjaan adalah seseorang yang kegiatan utamanya sedang mencari pekerjaan, atau sementara sedang mencari pekerjaan dan belum bekerja minimal 1 jam selama seminggu yang lalu. Jadi angkatan kerja dapat diformulasikan melalui persamaan identitas sebagaiberikut: $AK = K + MP$. Penjumlahan angka-angka angkatan kerja dalam bahasa ekonomi disebut sebagai penawaran angkatan kerja (*labour*

supply). Sedangkan penduduk yang berstatus sebagai pekerja atau tenaga kerja termasuk ke dalam sisi permintaan (*labour demand*). Bukan Angkatan Kerja (*unlabour force*), adalah penduduk yang berusia kerja (15 tahun ke atas) yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan, dan sedang mencari kerja, yaitu : orang-orang yang kegiatannya sekolah (pelajar, mahasiswa), mengurus rumah tangga serta menerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung atas jasa kerjanya (pensiunan, penderita cacat yang independen). Jadi jumlah usia kerja (UK) apabila dilihat melalui persamaan identitas adalah sebagai berikut:

$$UK = AK + BAK$$

Tingkat pengangguran (*unemployment rate*), adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja sedang aktif mencari pekerjaan, yaitu membandingkan jumlah orang yang mencari pekerjaan dengan jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran (TP) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$TP = MP/AK \times 100\%$$

Tingkat Pengangguran Alamiah (*natural rate of unemployment*) adalah keadaan yang menunjukkan adanya tingkat pengangguran rata-rata yang berfluktuasi. Tingkat Pengangguran alamiah bisa dipandang sebagai tingkat pengangguran yang mempengaruhi gravitasi perekonomian dalam jangka panjang, dengan adanya ketidaksempurnaan pasar tenaga kerja yang menyulitkan pekerja dari proses perolehan pekerjaan dengan segera.

F. Teori Ketenagakerjaan

1. Teori Klasik Adam Smith

Adam Smith (1729-1790) merupakan tokoh utama dari aliran ekonomi yang kemudian dikenal sebagai aliran klasik. Dalam hal ini teori klasik Adam Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu (*necessary condition*) bagi pertumbuhan ekonomi.

2. Teori Klasik J.B. Say

Jean Baptise Say (1767-1832) mengatakan bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri (*supply creates its own demand*). Pendapat Say ini disebut Hukum Say (*Say's Law*). Hukum Say didasarkan pada asumsi bahwa nilai produksi selalu sama dengan pendapatan. Tiap ada produksi akan ada pendapatan, yang besarnya sama dengan nilai produksi tadi. Dengan demikian dalam keadaan keseimbangan, produksi cenderung menciptakan permintaannya sendiri akan produksi barang yang bersangkutan. Berdasarkan asumsi seperti ini ia menganggap bahwa peningkatan produksi akan selalu diiringi oleh peningkatan pendapatan, yang akhirnya akan diiringi pula oleh peningkatan permintaan.

3. Teori Keynes

John Maynard Keynes (1883-1946) berpendapat bahwa dalam kenyataan pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan pandangan klasik. Dimanapun

para pekerja mempunyai semacam serikat kerja (*labor union*) yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan tingkat upah.

Menurut Keynes, kegiatan perekonomian tergantung pada segi permintaan, yaitu tergantung kepada perbelanjaan atau pengeluaran agregat yang dilakukan perekonomian pada suatu waktu tertentu. Diartikan dengan pengeluaran agregat adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sesuatu perekonomian dalam suatu periode tertentu, dan hanya bisa diukur untuk suatu tahun tertentu.

Semakin besar pembelanjaan agregat (permintaan agregat) yang dilakukan dalam perekonomian, semakin tinggi tingkat kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja yang dicapai. Permintaan agregat yang wujudnya tidak selalu mencapai tingkat permintaan yang diperlukan untuk mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Oleh sebab itu, pengangguran akan selalu berlaku. Untuk mengatasinya, pemerintah perlu memengaruhi permintaan agregat.

Dalam hal ini, diasumsikan bahwa terdapat hubungan antara output nasional dan kesempatan kerja nasional. Apabila pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan maka kesempatan kerja mengalami kenaikan. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan maka kesempatan kerja pun akan mengalami penurunan.

Pandangan *mainstream economy* terhadap permintaan tenaga kerja adalah sebagaimana permintaan terhadap faktor produksinya, dianggap sebagai permintaan turunan (*derived demand*), yaitu penurunan dari fungsi perusahaan. Meskipun fungsi perusahaan cukup bervariasi, meliputi

memaksimumkan keuntungan, memaksimumkan penjualan atau perilaku untuk memberikan kepuasan kepada konsumen, namun maksimisasi keuntungan sering dijadikan dasar analisis dalam menentukan penggunaan tenaga kerja.

Mempertimbangkan hal tersebut (maksimisasi keuntungan), dan dengan asumsi perusaha beroperasi dalam sistem pasar persaingan, maka perusahaan cenderung untuk mempekerjakan tenaga kerja dengan tingkat upah sama dengan nilai produk marginal tenaga kerja (*ValueMarginal Product of Labor, VMPL*). VMPL menunjukkan tingkat upah maksimum yang mau dibayarkan oleh perusahaan agar keuntungan perusahaan maksimum.

4. Teori Harrod-Domar

Teori Harrod-domar (1946) dikenal sebagai teori pertumbuhan. Menurut teori ini investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tapi juga memperbesar kapasitas produksi. Kapasitas produksi yang membesar membutuhkan permintaan yang lebih besar pula agar produksi tidak menurun. Jika kapasitas yang membesar tidak diikuti dengan permintaan yang besar, surplus akan muncul dan disusul penurunan jumlah produksi.

G. Tingkat Pengangguran

Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan dengan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang

diinginkannya. Menurut definisi BPS, (2011) pengangguran yaitu bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja) atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat pengangguran menurut BPS dihitung dengan Cara:

$$\text{Tingkat pengangguran } th_i = \frac{\sum \text{Orang yang mencari kerja}}{\sum \text{Angkatan kerja}} \times 100\%$$

Oleh sebab itu, menurut Sadono Sukirno (2000) pengangguran biasanya dibedakan atas 3 jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, antara lain:

1. Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari kerja yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya.
2. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dalam perekonomian.
3. Pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat.

H. Investasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting di dalam kaitannya dengan pendapatan nasional. Hubungan antara investasi dan pendapatan nasional itu

sedemikian pentingnya, sehingga dapatlah dimengerti mengapa dalam semua teori ekonomi makro investasi di bahas dalam bagian tersendiri.

Teori konvensional (klasik) tentang investasi pada pokoknya didasarkan atas teori produktivitas batas (*marginal productive*) dari faktor produksi modal (kapital). Berdasarkan teori ini besarnya modal yang akan di investasikan dalam proses produksi ditentukan oleh produktivitas marginalnya dibandingkan dengan tingkat bunga, sehingga investasi itu akan terus dilakukan bilamana produktivitas batas dari investasi masih lebih tinggi dari pada tingkat bunga yang akan diterima. Investasi akan dijalankan bilamana pendapatan dari investasi itu (*prospected yield*) lebih besar dari tingkat bunga. Bila hendak membandingkan antara pendapatan dari investasi dengan suku bunga maka tidak boleh dilupakan bahwa barang-barang modal umumnya mempunyai penggunaan yang panjang dan tidak hanya sekali pakai, sehingga pendapatan dari investasi (yang akan dibandingkan dengan bunga) adalah terdiri dari jumlah-jumlah pendapatan yang akan diterima setiap akhir tahun, selama penggunaan barang modal itu dalam produksi (umur ekonomis), jumlah pendapatan tiap-tiap tahun selanjutnya dibandingkan dengan tingkat bunga yang berlaku sekarang. Investasi dalam suatu barang modal adalah menguntungkan bilamana biaya (ongkos) plus bunga lebih kecil dari hasil pendapatan yang diharapkan dari investasi itu. Dengan demikian unsur-unsur yang diperhitungkan dalam penentuan investasi adalah : (1) tingkat ongkos biaya atas barang modal; (2) tingkat bunga; dan (3) tingginya hasil pendapatan

yang diterima. Berubahnya salah satu dari ketiga faktor di atas, akan mengakibatkan berubahnya perhitungan profitabilitas.

Menurut pandangan dari JM. Keynes, masalah investasi, baik penentuan jumlah maupun kesempatan untuk melakukan investasi didasarkan atas konsep Marginal Efficiency of Investment (MEI). Dengan mendasarkan atas konsep pemikiran tersebut investasi akan dilaksanakan apabila MEI masih lebih tinggi daripada tingkat bunga. Secara grafis MEI itu digambarkan sebagai suatu skedul yang menurun, skedul ini menggambarkan jumlah investasi yang akan terlaksana pada setiap tingkat bunga. Menurunnya tingkat skedul MEI ini antara lain disebabkan oleh dua hal, yaitu :

1. Bahwa semakin banyak jumlah investasi yang terlaksana dalam masyarakat, makin rendah Efisiensi Marginal Investasi itu.
2. Semakin banyak investasi dilakukan, maka ongkos dan barang modal (asset) menjadi lebih tinggi.

Investasi yang sering dikenal dengan istilah penanaman modal. Kegiatan investasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan perekonomian guna memperbesar dan meningkatkan tingkat produksi dalam suatu usaha dan meningkatkan kesempatan kerja. Dengan demikian istilah investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah

kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2001).

Menurut (Suparmoko, 1993) memberikan arti investasi sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanam-penanam modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Secara garis besar investasi dapat digolongkan menjadi tiga (Sukirno, 2001) yaitu antara lain.

1. *Autonomous investment*, yaitu investasi yang tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, misalnya investasi pada rehabilitasi prasarana jalan dan irigasi. Investasi jenis ini biasanya lebih banyak dilakukan oleh sektor pemerintah, karena investasi ini akan menyangkut banyak aspek sosial budaya yang ada di masyarakat.
2. *Induced investment*, yaitu macam investasi yang mempunyai kaitan dengan tingkat pendapatan, misalnya adanya kenaikan pendapatan yang ada pada masyarakat di suatu tempat atau negara menyebabkan kenaikan kebutuhan barang tertentu. Kenaikan atau pertambahan permintaan terhadap barang sudah tentu akan mendorong untuk melakukan investasi.
3. Investasi yang sifatnya dipengaruhi oleh adanya kenaikan tingkat bunga uang atas modal yang berlaku di masyarakat.

Dari ketiga investasi yang digolongkan menurut (Sukirno, 2005) investasi di Provinsi Lampung cenderung lebih dominan pada kelompok *Induced Investment* yaitu investasi yang mempunyai kaitan dengan tingkat pendapatan. Hal ini disebabkan karena pada umumnya masyarakat Lampung menanamkan modalnya hanya untuk mereka yang memiliki pendapatan yang lebih, misalnya investor berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang berkembang di Lampung. Keuntungan investasi di suatu industri akan menarik investor lain untuk berinvestasi karena menginginkan keuntungan. Oleh karena itu, investor dapat memperkirakan keuntungan dari investasi yang akan dilakukannya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah investasi (Deliarnov, 1995) yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Inovasi dan Teknologi

Adanya temuan-temuan baru menyebabkan cara-cara berproduksi lama menjadi tidak efisien. Untuk itu perusahaan-perusahaan perlu menemukan investasi untuk membeli peralatan mesin-mesin yang canggih.

2. Tingkat Perekonomian

Makin banyak aktivitas perekonomian makin besar pendapatan nasional dan makin banyak bagian pendapatan yang dapat ditabung, yang pada gilirannya akan diinvestasikan pada suatu usaha yang menguntungkan.

3. Tingkat Keuntungan Perusahaan

Makin besar tingkat keuntungan perusahaan, maka makin banyak bagian laba yang dapat ditahan dan dapat digunakan untuk tujuan investasi.

4. Situasi Politik

Jika situasi politik aman dan pemerintah banyak memberikan kemudahan-kemudahan bagi perusahaan, maka tingkat investasi akan tinggi. Salah satu kegiatan investasi yang dapat diketahui adalah penanaman modal, penanaman modal dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta. Untuk investasi swasta di Indonesia yang dilakukan dengan kemudahan fasilitas berupa PMA dan PMDN.

I. Hubungan Pendapatan Per Kapita dan Ketimpangan Pendapatan

Wilayah

Simon Kuznets (1995) dalam Kuncoro (2006) membuat hipotesis adanya kurva U terbalik (*inverted U curve*) bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata.

Simon Kuznets mengatakan bahwa tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, dan tahap selanjutnya, distribusi pendapatannya akan membaik, namun pada suatu waktu akan terjadi peningkatan disparitas lagi dan akhirnya menurun lagi. Kuznets menyimpulkan bahwa dalam jangka pendek ada korelasi positif antara pertumbuhan pendapatan perkapita dengan disparitas pendapatan. Namun dalam jangka panjang hubungan keduanya menjadi korelasi yang negatif.

J. Hubungan Jumlah Pengangguran dan Ketimpangan Pendapatan Wilayah

Ketimpangan wilayah disebabkan juga karena adanya perbedaan kondisi demografi yang cukup besar antar wilayah. Menurut Syafrizal (2008), kondisi demografis dalam suatu wilayah meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur dari kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan yang dimiliki masyarakat daerah yang bersangkutan. Kondisi demografis berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat dalam suatu daerah. Kondisi demografis yang baik cenderung meningkatkan produktivitas kerja, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Tingkat pengangguran yang tinggi berpengaruh terhadap tingkat produktivitas suatu wilayah, akan menyebabkan produktivitas suatu wilayah tidak optimal sehingga pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut tertinggal dengan wilayah yang lain. Melihat kondisi demografis dari sisi tingkat pengangguran di suatu daerah, menurut Lesman (2006), tingkat pengangguran yang tinggi akan menyebabkan ketimpangan yang tinggi pula.

K. Hubungan Investasi dengan Ketimpangan Pendapatan Wilayah

Investasi termasuk didalamnya penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) merupakan faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, menurut Myrdal (1957) dalam Jhingan (2010) investasi cenderung mengurangi ketimpangan regional. Permintaan yang meningkat di wilayah yang membutuhkan akan merangsang investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No.	Judul dan Penulis (1)	Variabel (2)	Alat Analisis (3)
1.	Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi Di Sumatera (Yeniwati, 2013)	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Williamson • Investasi • Aglomerasi • Sumber daya alam 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Wlliamson • Analisis Regresi Data Panel
<p>Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan hasil estimasi investasi (X1), aglomerasi (X2) dan sumber daya alam (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan ekonomi. Investasi mempunyai dampak yang negative terhadap ketimpangan ekonomi, artinya jika investasi naik maka ketimpangan ekonomi akan turun dengan. Sedangkan aglomerasi memberikan efek yang positif terhadap ketimpangan ekonomi, artinya jika aglomerasi meningkat maka ketimpangan ekonomi akan meningkat atau dengan kata lain terjadi penurunan dalam pemerataan hasil pembangunan ekonomi. Sementara itu, dilihat dari sumber daya alam yang memberikan pengaruh yang negative terhadap ketimpangan ekonomi, artinya jika sumber daya alam meningkat maka ketimpangan ekonomi akan menurun. 			
2.	Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan di Kabupaten Gianyar (N. P. M. Eka Raswita dan M. S. Utama, 2011)	<ul style="list-style-type: none"> • Ketimpangan Pendapatan • Pendapatan Per Kapita • Pertumbuhan Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Tipologi Klassen • Indeks Williamson • Analisis Regresi Data Panel
<p>Hasil :</p>			

	<ul style="list-style-type: none"> • Dari hasil analisis dan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pengklasifikasian kabupaten/kota berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita di Kabupaten Gianyar memakai alat analisis Tipologi Klassen dengan pendekatan daerah menunjukkan Kecamatan di Kabupaten Gianyar terbagi menjadi empat klasifikasi yang ada. Pada Periode 1993-2009 Sebanyak empat Kecamatan yaitu Kecamatan Sukawati, Blahbatuh, Gianyar, Tegallang berada pada kuadran IV. Kecamatan Payangan berada pada kuadran III dan Kecamatan Tampaksiring berada pada Kuadran II (kedua) yakni daerah maju tapi tertekan. Kecamatan Ubud berada pada Kuadran I (pertama) yakni daerah cepat maju dan cepat tumbuh. • Ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Gianyar periode 1993-2000 antar kecamatan pada periode tersebut mengalami peningkatan. Rata-rata angka Indeks Williamson di kabupaten Gianyar periode penelitian adalah sebesar 0,300. Kurva hubungan antara Indeks Williamson dengan pendapatan per kapita menunjukkan bentuk U terbalik, dapat dikatakan hipotesis Kuznets berlaku di Kabupaten Gianyar pada periode penelitian (1993 -2009). 		
3.	Analisis Perbandingan Disparitas Ekonomi Antar Kecamatan di Kabupaten Klaten Sebelum dan Sesudah Krisis Ekonomi tahun 1998 (Agung Prihantoro, 2005)	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB • Tenaga Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Tipologi Klassen • Indeks Williamson • Analisis Kesenjangan Relatif
<p>Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kriteria pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten sebelum krisis ekonomi 1998 termasuk tinggi dan sesudah termasuk sedang. • Berdasarkan Analisis Tipologi Daerah sebelum krisis Kecamatan Ceper termasuk kategori tipologi daerah I diantara kecamatan yang lain. • Menurut Indeks Williamson sebelum krisis ekonomi 1998 tertinggi adalah Kecamatan Ceper sebesar 0,147 dan sesudah krisis tertinggi adalah Kecamatan Klaten Tengah sebesar 0,348. Rata – rata Indeks Williamson sesudah krisis lebih besar dari sesudah 			

	<p>krisis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berdasar Analisis Kesenjangan Relatif 10 kecamatan berpendapatan terendah dengan rata – rata indeks kesenjangan relatif 40% untuk kecamatan berpendapatan rendah. 		
4.	<p>Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Ketimpangan Pendapatan Antar Propinsi Di Indonesia (Halida Fatimah, 2007)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketimpangan ekonomi antar Wilayah • PAD • Transfer Fiskal • Derajat Desentralisasi Fiskal 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Williamson • OLS
<p>Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih tingginya tingkat ketimpangan pendapatan antar propinsi di Indonesia, mengindikasikan masih belum cukup upaya-upaya pemerintah dalam menekan tingkat ketimpangan yang terjadi selama ini. Diperlukan kajiankajian yang lebih mendalam lagi sehingga arah kebijakan untuk mengatasi masalah ketimpangan ini bisa tepat sasaran. • Tidak terbuktinya transfer fiskal dalam menurunkan tingkat ketimpangan transfer fiskal, maka perlu ditinjau ulang tentang pola transfer yang selama ini digunakan (formula). Disamping itu, tetap perlu adanya fungsi pengawasan dari pemerintah pusat tentang penggunaan anggaran daerah terlebih terkait adanya penyimpanan DAU di SBI. Kedua hal ini diduga sebagai faktor yang cukup kuat mengapa tujuan transfer fiskal tersebut tidak tercapai. • Melihat peranan PAD dalam membentuk tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah juga dalam menekan tingkat ketimpangan yang terjadi. Maka pemerintah daerah harus secara bijak dan arif dalam menggali sumber sumber PAD ini, jangan sampai gagasan ”<i>autonomy</i>” terdistorsi menjadi pendekatan ”<i>automoney</i>”. Sehingga dapat menimbulkan inefisiensi dalam iklim investasi pemerintah setempat, yaitu dengan diterbitkannya berbagai perda tentang pajak dan retribusi. 			

5.	Fizcal Decentralization and Regional Disparity : Evidence From Cross Section and Panel Data – 23 OECD Countries (Christian Lesman, 2009)	<ul style="list-style-type: none"> • Ketimpangan Ekonomi antar Wilayah • Indeks Desentralisasi Pajak • Indeks Desentralisasi Pendapatan yang Disesuaikan • GDP Per Kapita 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ordinary Least Square</i> • Koefisien Gini • Koefisien Variasi (CV)
<p>Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regresi cross section menunjukkan bahwa negara-negara dengan derajat desentralisasi yang tinggi memperlihatkan kesenjangan antar negara yang cukup rendah. Dan regresi panel telah menunjukkan bahwa peningkatan menyebabkan penurunan disparitas dalam negara. Secara umum, hasil menunjukkan bahwa desentralisasi tidak berbahaya bagi pemerataan antar negara, dan bukan sebaliknya. • Namun demikian, ada perbedaan yang cukup besar antara konsep desentralisasi alternatif. Analisis cross-section menunjukkan bahwa de jure kebijakan desentralisasi politik tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap ketimpangan regional, sedangkan efek de facto kebijakan desentralisasi mencerminkan desentralisasi fiskal adalah negatif signifikan. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa itu bukan desentralisasi politik tetapi desentralisasi fiskal yang menentukan kesenjangan regional. 			